

**PROBLEMATIKA MASYARAKAT DESA LIANG ASONATERHADAP
PENCATATAN PERNIKAHAN DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Ds. Liang
Asona Kec. Padang Bolak, Kab. PALUTA)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar sarjana (S1)
dalam Al-Akhwāl Al-Syakhsīyah

OLEH:

BANGUN DASOPANG

NIM. 21 15 3 083



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2020 M/1442 H**

**PROBLEMATIKA MASYARAKAT DESA LIANG ASONA TERHADAP
PENCATATAN PERNIKAHAN DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) (Studi Kasus Desa Liang
Asona Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara)**

Oleh:

BANGUN DASOPANG

NIM. 21 15 3 083

Menyetujui:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING I

Dr. Armia, M.A

NIP. 19590905 199203 1 003

Irwan, M.Ag

NIP. 19721215 200112 1 004

Mengetahui:

Ketua Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyah
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera
Utara Medan.

Dra. Amal Hayati M.Hum

NIP. 19680201 199303 2 005

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **BANGUN DASOPANG**
NIM : 21.15.3.083
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Judul Skripsi **PROBLEMATIKA MASYARAKAT DESA LIANG
ASONA TERHADAP PENCATATAN PERNIKAHAN
DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DITINJAU
DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI). (Studi Kasus
Desa Liang Asona Kec. Padang Bolak Kab. Padang
Lawas Utara).**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Judul di atas adalah benar/asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan saya ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya. Atas perhatiannya Bapak/Ibu saya ucapkan terimakasih.

Medan, 03 Januari 2020
Yang membuat pernyataan,

BANGUN DASOPANG
NIM. 21.15.3.083

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “PROBLEMATIKA MASYARAKAT DESA LIANG ASONA TERHADAP PENCATATAN PERNIKAHAN DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) (Studi Kasus Desa Liang Asona Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara)” a.n. Bangun Dasopang, telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah & Hukum UIN-SU Medan pada Hari Kamis tanggal 19 Maret 2020. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana (S1) dalam Ilmu Syari’ah pada Jurusan Al-Akhwāl Al-Syakhsīyyah.

Medan, 19 Maret 2020

Panitia Sidang Munaqasyah

Skripsi Fakultas Syari’ah & Hukum

UIN Sumatera Utara Medan

Ketua,

Sekretaris,

Dra. Amal Hayati, M.Hum

NIP.19680201 199303 2 005

Irwan, M.g

NIP.19721215 200112 1 004

Anggota

Dr. Armia, M.Ag

NIP. 19590905 199231 003

Irwan, M.Ag

NIP.19721215 200112 1 004

Ibnu Radwan Siddik Turnip, M.A

NIP. 197409102 000003 1 001

Ali Akbar, S.Ag., M.A

NIP. 19740719 200901 2 010

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari’ah & Hukum

UIN Sumatera Utara Medan

Dr. Zulham, S.H.I., M.Hum

NIP. 19770321 200901 1 008

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul : **“PROBLEMATIKA MASYARAKAT DESA LIANG ASONA TERHADAP PENCATATAN PERNIKAHAN DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)** (Studi Kasus Desa Liang Asona Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara).”

Bahwa problematika masyarakat tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) adalah karna (1) Jarak Desa Liang Asona ke Kantor Urusan Agama (KUA) yang cukup jauh sehingga menyebabkan pelaku malas untuk mendaftarkannya. (2) Infrastruktur jalan dari desa (sebaliknya) ke Kantor Urusan Agama (KUA) yang tidak mendukung. (3) Keberadaan alat transportasi (angkutan umum/angkutan pribadi) yang tidak mendukung. (4) Kurangnya pendidikan (pemahaman) pelaku tentang pencatatan pernikahan. (5) Beberapa diantara pelaku nikah tersebut belum cukup umur untuk menikah sesuai ketentuan Undang-undang. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian lapangan dan wawancara terhadap pelaku nikah yang tidak mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA), hatobangon (malim kampung), pihak KUA Kecamatan Padang Bolak, dan juga data sekunder yaitu semua referensi pendukung seperti al-Qur'an, al-Hadis, dan buku-buku fikih yang berkaitan. Dengan tidak dilakukannya kewajiban pencatatan perkawinan, maka perkawinan yang telah dilaksanakan menurut tata cara Hukum Islam tersebut menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak sah.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan basmallah penulis memulai tulisan skripsi ini dan dengan puji beserta syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah yang telah diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beriringkan salam penulis hanturkan kepada Suri Tauladan kita Rasulullah Nabi Muhammad SAW, semoga kita termaksud umat beliau yang mendapatkan Syafaat-Nya di hari akhir nanti. Amin

Dalam melengkapi tugas-tugas perkuliahan dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara maka disusunlah skripsi dengan Judul: **“Problematika Masyarakat Desa Liang Asona Terhadap Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Studi Kasus Desa Liang Asona Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara)**

” Sepanjang penulisan skripsi ini tentunya penulis tidak bisa menghindar dari berbagai kesulitan dan hambatan, tetapi berkat kemauan penulis dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M. Ag, selaku Rektor UIN SU, selaku pusat penggerak kampus sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di kampus UIN SU ini.
2. Ibu Dra. Amal Hayati, M. Hum., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyah yang telah memberi arahan dan mempermudah penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Armia, M.Ag, sebagai pembimbing I dan bapak Irwan, M.Ag., sebagai pembimbing II. Terima kasih atas ilmu, waktu dan dukungannya selama ini kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak dengan nikmat dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.
4. Bapak Dr. Budi Sastra Panjaitan, M.Hum., sebagai pembimbing akademik atas arahan, motivasi dan bimbingannya selama ini.
5. Ucapan teristimewa yang tulus dan penuh bakti penulis hanturkan kepada Ayahanda alm. Ahmad Toha Hsb. dan Ibunda Syahroini Siregar yang telah mengasuh, mendidik, membantu, mendo'akan dan telah banyak berkorban moril maupun materil dengan penuh kesabaran dan

keikhlasan yang tiada tara dan motivasi hingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.

6. Kepada kakek Prof. Haidar Daulay, M.A., yang telah membantu saya selama ini baik dalam bentuk moril maupun materil yang penuh keikhlasan dan motivasi hingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan (S1) ini dengan baik.
7. Terimakasih kepada abang saudara Awaluddin Hasibuan atas dorongan belajar yang selama ini diberikan kepada penulis, terlebih materil.
8. Kepada Abangda Ibrahim Ihksan Lubis, S.H., terima kasih atas kesempatan waktu terlebih ilmu yang diberikan kepada saya selama dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kepada teman-teman SMA dan teman-teman KKN yang sampai saat ini tidak pernah lupa untuk saling menyemangati. Semoga kita tetap menjalin hubungan dan silaturahmi yang baik.

Penulis hanya dapat bermohon pada pemilik Ketentraman Hati, Allah SWT, agar menganugerahkan kasih sayang-Nya sebagai balasan atas setiap kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dalam tata bahasa maupun lingkup pembahasannya. Untuk itu penulis menerima saran dan kritik yang membangun dari pembaca. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pengetahuan semua pihak khususnya dalam bidang Al-Ahwal Al-Syakhsyah untuk pembaca.

Amiinn...

Medan. 03 Januari 2020

Penulis,

Bangun Dasopang

NIM. 21.15.3.083

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PERNYATAAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
IKHTISAR	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah	1
B. Rumusan masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kajian Terdahulu	11
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Pembahasan	15

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

A. Pengertian Dan Dasar Hukum Perkawinan.....	17
1. Pengertian Perkawinan	17
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	20

B. Syarat Dan Rukun Perkawinan	25
C. Pencatatan Perkawinan	29

BAB III: GAMBARAN UMUM DESA LIANG ASONA

A. Letak Geografis dan Komposisi Penduduk Desa Liang Asona	40
B. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Liang Asona	42
C. Pendidikan dan Keagamaan Masyarakat Desa Liang Asona	44

BAB IV: TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

TERHADAP PERNIKAHAN YANG DILAKUKAN TANPA PENCATATAN DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DI DESA LIANG ASONA

A. Problematika Masyarakat Desa Liang Asona Terhadap Pernikahan yang Dilakukan Tanpa Pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA)	49
B. Pemahaman Masyarakat Desa Liang Asona Terhadap Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA)	55
C. Analisis Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pernikahan yang Dilakukan Tanpa	

Pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA)	59
---	----

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA.....	72
---------------------	----

LAMPIRAN LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menikah merupakan salah satu fase kehidupan yang lazim dilakukan oleh setiap manusia dewasa (akil baligh), siap lahir batin, serta memiliki rasa tanggung jawab dalam membangun rumah tangga. Setiap orang yang telah memenuhi persyaratan tersebut dianjurkan agar menginjakkan kakinya ke jenjang pernikahan. Jenjang inilah yang menandai sebuah fase kehidupan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup seseorang pada masa mendatang. Dibandingkan dengan hidup sendirian, kehidupan berkeluarga memiliki banyak tantangan dan sekaligus mengandung sejumlah harapan positif. Tidak dimungkiri dalam pernikahan terdapat banyak manfaatnya jika kita dapat mengelolanya dengan baik.¹

Pencatatan perkawinan adalah kegiatan pengadministrasian dari sebuah perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah kedua calon mempelai melangsungkan perkawinan yang beragama Islam, dan di Kantor

¹ Happy Santoso, *Nikah siri apa untungnya*, (Jakarta: Visimedia, 2007), h. 1

Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama selain Islam.² Pencatatan perkawinan merupakan salah satu prinsip hukum perkawinan nasional yang bersumberkan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.³

Administrasi atau pencatatan perkawinan diberlakukan di hampir semua negara muslim di dunia, meskipun berbeda satu sama lain dalam penekanannya. Menurut Khoiruddin Nasution aturan pencatatan perkawinan di negara-negara muslim dapat dibagi menjadi tiga kelompok: pertama, kelompok negara yang mengharuskan pencatatan dan memberikan sanksi (akibat hukum) bagi mereka yang melanggar, seperti halnya di Brunei Darussalam, Singapura, Iran, India, Pakistan, Yordania, dan Republik Yaman. Sementara yang kedua, negara-negara yang menjadikan pencatatan hanya sebagai syarat administrasi dan tidak memberlakukan sanksi atau denda bagi yang melanggar, seperti Filipina, Lebanon, Maroko, dan Libya.

² Saifuddin Afief, *Notaris Syariah dalam Praktik Jilid ke I Hukum Keluarga Islam* (Jakarta: Darunnajah Publishing, 2011), h. 137

³ Rachmadi Usman, *Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 14 No. 3, h. 255

Ketiga negara yang mengharuskan pencatatan tetapi tidak mengakui adanya perkawinan yang tidak dicatatkan. Hal ini hanya terjadi di Syiria.⁴

Ada beberapa analisis yang dapat dikemukakan mengapa pencatatan perkawinan tidak diberi perhatian yang serius oleh fiqih walaupun ada ayat al-Qur'an yang menganjurkan untuk mencatat segala bentuk transaksi muamalah. Pertama, larangan untuk menulis sesuatu selain al-Qur'an. Akibatnya kultur tulis tidak begitu berkembang dibandingkan dengan kultur hafalan (oral). Kedua, kelanjutan dari yang pertama, maka mereka sangat mengandalkan hafalan (ingatan). Agaknya mengingat sebuah peristiwa perkawinan bukan lah sebuah hal yang sulit untuk dilakukan. Ketiga *walimat al-'urusy* walaupun dengan seekor kambing merupakan saksi di samping saksi syar'i tentang sebuah perkawinan. Keempat, ada kesan perkawinan yang berlangsung pada masa-masa awal Islam belum terjadi antar wilayah negara yang berbeda. Biasanya perkawinan pada masa itu berlangsung di mana calon suami dan calon istri berada dalam suatu wilayah yang sama. Sehingga alat bukti kawin selain saksi belum dibutuhkan.

⁴ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 182

Dengan alasan-alasan yang telah disebut di atas, dapatlah dikatakan bahwa pencatatan perkawinan belum dipandang sesuatu yang sangat penting sekaligus belum dijadikan sebagai sebuah alat bukti autentik terhadap sebuah perkawinan.

Sejalan dengan perkembangan zaman dengan dinamika yang terus berubah maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Pergeseran kultur lisan (oral) kepada kultur tulis sebagai ciri masyarakat modern, menuntut dijadikannya akta, surat sebagai bukti autentik. Saksi hidup tidak lagi bisa diandalkan tidak saja karena bisa hilang dengan sebab kematian, manusia dapat juga mengalami kelupaan dan kesilapan. Atas dasar ini diperlukan sebuah bukti yang abadi itulah yang disebut dengan akta.

Dengan demikian salah satu bentuk pembaruan hukum keluarga Islam adalah dimuatnya pencatatan perkawinan sebagai salah satu ketentuan perkawinan yang harus dipenuhi. Dikatakan pembaruan hukum Islam karena masalah tersebut tidak ditemukan di dalam kitab-kitab fiqh ataupun fatwa-fatwa ulama.⁵

⁵ Amiur Nuruddin dkk., *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 121

Di dalam UU No. 1/1974 pasal 2 ayat 2 dinyatakan bahwa: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Ini adalah satu-satunya ayat yang mengatur tentang pencatatan perkawinan. Di dalam penjelasannya tidak ada uraian yang lebih rinci kecuali yang dimuat di dalam PP No. 9 tahun 1975. Ini berbeda dengan ayat 1 yang di dalam penjelasannya dikatakan (i) tidak ada hukum perkawinan di luar hukum agama dan (ii) maksud hukum termasuk ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Di dalam PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang perkawinan pasal 3 ada dinyatakan:

1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
2. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
3. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat 2 disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat (atas nama) Bupati Kepala Daerah.

Dengan demikian, pencatatan perkawinan ini walaupun di dalam UUP hanya diatur oleh satu ayat, namun sebenarnya masalah pencatatan ini sangat dominan. Ini akan tampak dengan jelas menyangkut tata cara perkawinan itu sendiri yang kesemuanya berhubungan dengan pencatatan.

Sedangkan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) memuat masalah pencatatan perkawinan ini pada pasal 5 sebagai berikut:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut harus pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Selanjutnya pada pasal 6 dijelaskan:

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.⁶

⁶ Elvi Lusiana, *100+ Kesalahan dalam Pernikahan* (Jakarta: Redaksi Qultum Media), h. 142

Aturan-aturan di dalam KHI ini sudah melangkah lebih jauh dan tidak hanya bicara masalah administratif. Pertama, di dalam pasal 5 ada klausul yang menyatakan agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam. Ketertiban di sini menyangkut *ghayat al-tasyri'* (tujuan hukum Islam) yaitu menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat. Kedua, pada pasal 6 ayat 2 ada klausul tidak mempunyai kekuatan hukum.

Syariat Islam tidak mensyaratkan agar akad nikah dilangsungkan di depan seorang hakim atau ulama. Kedua pihak akad bisa melangsungkan akad nikah sendirian tanpa harus ada pihak lain yang melakukannya. Untuk melaksanakannya cukup dengan mengucapkan ijab dan qabul secara verbal dan dihadiri dua orang saksi. Syariat Islam tidak menuntut kaum muslimin untuk mencatatkan akad nikahnya. Yang dituntut syariat Islam hanyalah agar akad nikah itu dipersaksikan dan diumumkan.

Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah berkata, “Akad nikah yang dilangsungkan seorang wali untuk anak perempuan perwaliannya tidak memerlukan peran seorang hakim, berdasarkan kesepakatan para ulama.”

Pencatatan akad nikah baru dimulai ketika kaum muslimin mulai menanggukuhkan pembayaran maharnya. Dokumen-dokumen catatan akad

nikah yang di dalamnya ditulis mahar yang ditangguhkan menjadi bukti telah terjadinya pernikahan.

Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah berkata, “Para sahabat tidak pernah mencatat masalah mahar sebab mereka tidak pernah menikah dengan mahar yang ditangguhkan.” Mereka membayar mahar secara tunai. Jika harus menangguhkan maka langkah itu telah diketahui bersama. Ketika orang-orang mulai menikah dengan mahar yang ditangguhkan, sementara masanya kadang lama sehingga bisa dilupakan, mereka pun mencatat utang mahar tersebut. Catatan itu menjadi bukti adanya hak mahar dan bahwa perempuan itu adalah suami dari seseorang.

Jika akad nikah tidak tercatat, terkadang menimbulkan banyak masalah sehingga banyak kitab-kitab fiqih yang terdorong untuk mengkajinya dengan seksama.

Beberapa orang yang lemah iman banyak yang mengklaim pernikahan secara dusta dan batil. Mereka mendukung klaimnya itu dengan kesaksian para saksi pembohong dan pendusta. Sementara itu, ada pula yang menafikan pernikahan karena ingin lari dari kewajiban dan tanggung jawab yang timbul dari pernikahan. Terkadang maksudnya mengingkari pernikahan

itu adalah ingin mengingkari anak-anaknya. Masalah juga bisa timbul akibat perbedaan dalam menentukan kadar mahar atau salah seorang dari suami istri mengaku telah mensyaratkan syarat tertentu, tetapi pihak lain mengingkari syarat tersebut.

Mayoritas undang-undang Hukum Keluarga di negara-negara Islam menyatakan perlunya mencatatkan akad nikah dan menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan akad. Syarat-syarat tersebut tidak bersifat syar'i karena pembuat undang-undang tidak berhak membuat satu hukum syara' yang syara' yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Ia hanyalah syarat yang berkonsekuensi pada timbulnya dampak-dampak hukum yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan hukum agama.

Jika syarat-syarat hukum itu tidak terpenuhi atau hanya sebagiannya yang terpenuhi maka pernikahan tetap sah meskipun undang-undang menetapkan sanksi atas pelakunya karena telah bertentangan dengan ketetapan hukum.⁷

⁷ Tinta Medina, *Pernikahan Syar'i: Menjaga Harga dan Martabat Manusia* (Solo: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)), h. 193

1. Julfahri Siregar (36) dan Seri Hannum (35) merupakan salah satu pasangan suami istri yang tidak memiliki buku nikah atau pernikahannya tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Padang Bolak. Julfahri Siregar yang juga sekaligus berprofesi sebagai malim kampung membenarkan bahwa dirinya memang tidak memiliki buku nikah atau pernikahannya tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Alasan disaat ditanya kenapa pernikahannya tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) adalah karena letak Kantor Urusan Agama (KUA) setempat yang sangat jauh dari desa hingga menyebabkan sulit untuk mengurusnya.⁸
2. Marabaik Pasaribu (27) dan Lela Sari Siregar (23) merupakan salah satu pasangan suami istri yang tidak memiliki buku nikah atau pernikahannya tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Padang Bolaki. Alasan pasangan suami istri ini tidak memiliki buku nikah adalah karena sulit proses pengurusannya. Kesulitan itu berupa jarak antar desa ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat yang sangat jauh.⁹
3. Dani (31) dan Sari Ati Hasibuan (23) merupakan salah satu pasangan suami istri yang tidak memiliki buku nikah atau pernikahannya tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Adapun alasan pasangan ini tidak memiliki buku nikah adalah karena ketiadaan

⁸ Wawancara dengan Julfahri Siregar yaitu salah satu pasangan suami yang tidak memiliki buku nikah atau pernikahannya tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Padang Bolak, diwawancarai di kediamannya tanggal 7 Mei 2018 pada pukul 13:00 WIB

⁹ Wawancara dengan Marabaik Pasaribu dan Lela Sari Siregar yaitu pasangan suami yang tidak memiliki buku nikah atau pernikahannya tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Padang Bolak, diwawancarai di kediamannya tanggal 8 Mei 2018 pada pukul 13:15 WIB

sarana untuk proses pengurusannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.¹⁰

4. Samarudin Siregar S.Ag., merupakan salah satu pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Bolak. Diwawancarai di kantornya, membenarkan bahwa hampir seluruh pasangan suami istri di desa Liang Asona tidak memiliki buku nikah atau pernikahannya tidak dicatatkan di KUA Padang Bolak.¹¹

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis merasa tertarik untuk mengkaji persoalan ini lebih lanjut dalam bentuk karya ilmiah (skripsi), untuk melihat apa saja kendala dalam melakukan pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Padang Bolak dengan mengangkat tema yang berjudul: **PROBLEMATIKA MASYARAKAT DESA LIANG ASONA TERHADAP PENCATATAN PERNIKAHAN DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)** (Studi Kasus di Desa Liang Asona Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Paluta).

¹⁰ Wawancara dengan Dani dan Sari Ati Hasibuan yaitu pasangan suami yang tidak memiliki buku nikah atau pernikahannya tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Padang Bolak, diwawancarai di kediamannya tanggal 8 Mei 2018 pada pukul 14:15 WIB

¹¹ Wawancara dengan H. Parundingan Hasibuan yaitu pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Padang Bolak, diwawancarai di Kantor Urusan Agama (KUA) tanggal 8 Mei 2018 pada pukul 13:25 WIB

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana problematika masyarakat Desa Liang Asona terhadap pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA)?
2. Bagaimana pemahaman masyarakat Desa Liang Asona terhadap pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA)?
3. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan seperti yang dilakukan Masyarakat Desa Liang Asona tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui problematika masyarakat Desa Liang Asona terhadap pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA).
2. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat Desa Liang Asona terhadap pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA)
4. Untuk mengetahui tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan di Desa

Liang Asona, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas
Utara.

D. Kajian Terdahulu

Berdasarkan pengamatan penulis ada sebuah karya tulis berupa jurnal yang berhubungan dengan pencatatan pernikahan sehingga dengan adanya jurnal ini bisa menjadi pelengkap dalam penelitian sebelumnya, penelitian tersebut yaitu: Jurnal Rachman Usman yang berjudul Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia, sedangkan judul yang di bahas penulis disini adalah Kesadaran Masyarakat Desa Liang Asona Terhadap Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA). Dengan demikian penulisan skripsi ini berbeda dengan penulisan sebelumnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Subjek Penelitian

Jenis penelitian ini dikategorikan ke dalam penelitian yuridis-empiris, yaitu penelitian hukum studi kasus (*study case*), karena

permasalahan yang diteliti adalah permasalahan hukum pada kawasan dan waktu tertentu.

Objek penelitian ini adalah masyarakat, pihak KUA dan hatobangon atau malim kampung. Dan yang menjadi subjek penelitian yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta buku-buku literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yang penulis ambil adalah keterangan dari beberapa pasangan suami istri yang pernikahannya tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Padang Bolak, pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Padang Bolak, tokoh agama dan tokoh adat desa Liang Asona.

b. Data Sekunder

Adapun data sekunder yaitu: buku-buku lainnya yang dapat menunjang dan mendukung dengan tema yang akan dibahas untuk menyelesaikan skripsi ini, seperti Jaih Mubarak, "Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia". Ahmad Tholabi Kharlie, "Hukum Keluarga

Indonesia”. Umar Sulaiman al-Asyqar, “Pernikahan Syar’i”. “Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer”. Hukum Perdata Islam di Indonesia, serta jurnal dan makalah lain yang berkaitan dengan pembahasan ini.

3. Instrumen Pengumpul Data

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi atau percakapan antara dua orang lebih guna memperoleh informasi. Seorang peneliti bertanya langsung kepada subjek atau responden untuk mendapatkan informasi yang diinginkan guna mencapai tujuannya dan memperoleh data yang akan dijadikan sebagai bahan laporan penelitiannya.¹²

Secara umum yang dimaksud wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara *semi structured*. Dalam hal ini maka mula-mula pewawancara menanyakan serentetan pertanyaan yang

¹² S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 113.

sudah terstruktur, kemudian diperdalam satu persatu guna mencari serta menggali keterangan lebih lanjut. Adapun mereka yang telah diwawancarai peneliti adalah masyarakat yang tidak mendaftarkan pernikahannya di KUA, hatobangon atau malim kampung, dan pihak KUA Kecamatan setempat.

b. Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap objek yang diteliti. Observasi dilakukan oleh peneliti dengan cara pengamatan dan pencatatan mengenai problematika masyarakat Desa Liang Asona terhadap pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA).

c. Studi Dokumen

Studi dokumen atau yang biasa disebut dengan kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Menurut Sugiyono pengertian studi dekontentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara

mempelajari dokumen untuk mendapatkan data informasi yang berhubungan masalah yang dengan masalah yang diteliti.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif. Yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggali atau membangun suatu proporsi atau menjelaskan dibalik realita.

F. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan dan pembahasan tersistematis dan terarah serta tidak begitu melebar maka penulis membagi ke dalam beberapa bab kemudian untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, langkah-langkah penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Umum Lokasi Penelitian dalam bab ini akan membahas bagaimana keadaan penduduk setempat, budaya, agama dan latar belakang pendidikannya.

Bab III Tinjauan umum tentang perkawinan, pengertian perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, pencatatan pernikahan, pengertian pencatatan pernikahan, pelaksanaan pencatatan pernikahan dan tujuannya.

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan, meliputi problematika yang dihadapi masyarakat Liang Asona terhadap pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan di PPN (KUA), pemahaman masyarakat desa Liang Asona terhadap pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan di PPN (KUA), tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Paluta, pemahaman masyarakat di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Paluta terhadap pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA).

Bab V Penutup berupa kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

A. PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM PERKAWINAN

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan sunatullah yang berlaku bagi semua umat manusia guna melangsungkan hidupnya dan memperoleh keturunan. Islam menganjurkan untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana yang dinyatakan dalam berbagai ungkapan dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹³

Pengertian nikah menurut bahasa berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Sedangkan arti kiasannya adalah *watha'* yang berarti bersetubuh atau *aqad* yang berarti mengadakan perjanjian.¹⁴ Namun

¹³ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

¹⁴ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta, 1974,

menurut pendapat yang shahih, nikah arti hakekatnya adalah akad.

Sedangkan *wathi'* sebagai arti kiasan atau majasnya.¹⁵

Sebagaimana disebutkan di dalam kitab al-Fiqh wala Madzahib al-Arba'ah oleh Abdurrahman al-Jaziri disebutkan kata “perkawinan” atau nikah secara etimologi adalah (وَ طِئ) yang berarti bersenggama atau bercampur. Dalam pengertian majas orang menyebut nikah sebagai aqad, dikarenakan aqad sebab diperbolehkan senggama.¹⁶

Nikah dalam arti *watha'* (senggama) sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ [البقرة : ٢٣٢]

Artinya:

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami

¹⁵ Imam Taqiyudin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Hism ad-Damasyqiasy-Syafi'i, *Kifayatul Akhyar*, Juz 2, Semarang, Toha Putra, h. 36.

¹⁶ Abdurrahman Al-Jaz'ri, *Al-Fiqh wala Madzhib al-Arba 'ah*, Jus IV, Bairut :al-Kutub al-Ilmiyah, 1990, h. 5.

pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.” (Q.S. al-Baqarah: 230).

Nikah berarti akad terdapat dalam firman Allah surat an-Nuur ayat

32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ

يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ [النور: ٢٣]

Artinya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (Q.S. an-Nur : 32).

Suatu perkawinan akan lahir dari padanya ikatan yang menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri yang bertujuan membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian pertalian antara laki-laki dan perempuan yang berisi persetujuan hubungan dengan maksud menyelenggarakan

kehidupan secara bersama-sama menurut syarat-syarat dan hukum susila.

Di mata orang yang memeluk agama, pengesahan hubungan perkawinan diukur dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan Tuhan sebagai syarat mutlak dan bagi orang-orang yang tidak mendasarkan perkawinan pada hukum ilahi, perkawinan dalam teori dan praktiknya adalah merupakan suatu kontrak sosial yang berisi persetujuan bahwa mereka akan hidup sebagai suami istri dan persetujuan tersebut diakui undang-undang atau adat dalam suatu masyarakat tersebut.¹⁷

Perkawinan pada prinsipnya adalah akad yang menghalalkan hubungan, membatasi hak dan kewajiban, serta tolong-menolong antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim.¹⁸ Istilah “nikah” atau “perkawinan” kerap kali dibedakan, namun pada prinsipnya hanya berbeda dalam hal interpretasi. Istilah “nikah” berasal dari bahasa Arab, sedangkan menurut bahasa Indonesia adalah “perkawinan”.¹⁹

¹⁷ Nasarudin Latif, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 2001, Cet.1, h.13-14.

¹⁸ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, Cet.1, h.188.

¹⁹ *Ibid.*

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan adalah suatu akad yang suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang sah dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah, penuh kebijakan dan saling menyantuni.²⁰ Islam menganjurkan adanya sebuah perkawinan. Karena ia mempunyai pengaruh yang baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia. Dengan perkawinan dapat membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab. Islam dalam menganjurkan perkawinan menggunakan beberapa cara. Sesekali disebutnya sebagai salah satu sunnah para nabi dan petunjuknya, yang mana mereka itu merupakan tokoh-tokoh tauladan yang wajib diikuti jejaknya. Firman Allah SWT:

أَرْسَلْنَا أَرْسَلْنَا رَسُولًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ

بِأَيَّةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ [الرَّعَد: ٨٣]

²⁰ Sudarsono, h. 188.

Artinya:

“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mu`jizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu)”. (Q.S. ar-Ra’ad: 38).

Terkadang juga disebut sebagai karunia yang baik, seperti firman

Allah SWT:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً

وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ [النحل:

[٢٧

Artinya:

“Allah telah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu anak-anak dan cucucucu dan memberimu rizki dari yang baik-baik.” (Q.S. an-Nahl : 72).

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ

وَأُولَٰئِكَ وَرُبَعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا

تَعُولُوا [النساء: ٣]

Artinya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S. an-Nisaa’: 3).

Dan terkadang dikatakan-Nya sebagai salah satu tanda kekuasaan-

Nya. Firman Allah SWT:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ [الروم: ١٢]

Artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. ar-Rum: 21).

Meskipun demikian masih banyak orang yang ragu-ragu untuk melaksanakan perkawinan, karena takut untuk memikul beban berat dan menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan. Padahal Islam telah menjelaskan bahwa dengan melaksanakan perkawinan, Allah akan

memberikan kepadanya penghidupan yang berkecukupan, menghilangkan kesulitan-kesulitannya dan diberikannya kekuatan yang mampu mengatasi kemiskinan, sebagaimana firman Allah dalam Q.S an-Nuur ayat 32.

Disamping ayat-ayat di atas ada juga Hadis-Hadis Nabi yang berisi anjuran-anjuran yang berisi perkawinan, di antaranya bahwa perkawinan itu dianjurkan bagi orang-orang yang telah dianggap mampu dan mempunyai kesanggupan memelihara diri dari kemungkinan-kemungkinan melakukan perbuatan yang tercela (terlarang), maka perkawinan lebih baik baginya. Sabda Nabi SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُّ لِلْبَصَرِ , وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ²¹

Artinya:

“Dari Abdullah bin Mas'ud r.a ia berkata: Rasulullah SAW bersabda kepada kamu: Wahai para pemuda! barang siapa diantara kamu sekalian yang mampu kawin, kawinlah. Maka sesungguhnya kawin itu lebih memejamkan mata (menundukkan pandangan) dan lebih memelihara farji, barang siapa yang belum kuat kawin (sedangkan

²¹ Sayyid Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subu al-Salam*, Juz III, Bandung : Dahlan, t.th, h. 109.

sudah menginginkannya) berpuasalah, karena puasa itu dapat melemahkan syahwat." (HR Bukhari dan Muslim).

Demikianlah Islam sangat menganjurkan bagi umatnya untuk melakukan perkawinan. Terutama bagi mereka yang sudah mampu untuk kawin baik secara lahiriyah maupun batiniyah, karena dengan perkawinan dapat mencegah serta menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama. Berdasarkan dalil-dalil yang menjadi dasar disyariatkannya perkawinan tersebut di atas, maka hukum asal perkawinan adalah mubah.²² Sedangkan menurut kesepakatan ulama, bahwa perkawinan merupakan suatu yang disunnahkan.²³

Manusia diciptakan Allah mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapatkan pemenuhan. Dalam pada itu manusia diciptakan Allah untuk mengabdikan dirinya kepada khaliq penciptanya dengan segala aktifitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi, antara lain keperluan biologisnya. Allah mengatur hidup manusia termasuk dalam penyaluran biologisnya dengan aturan perkawinan. Sehingga kalau disimpulkan ada

²² Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1993, h. 15

²³ Ali Ansori, *Al-Mizan al Kubra*, Juz II, Semarang :Toha Putra, t.th, h. 108

dua tujuan orang melangsungkan perkawinan, yakni untuk memenuhi petunjuk agama dan memenuhi naluri manusiawinya.

B. SYARAT DAN RUKUN PERKAWINAN

Dalam Islam, suatu perkawinan dianggap sah jika perkawinan itu telah dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum Islam. Syarat yang dimaksud ialah suatu hal yang pasti ada dalam pernikahan, akan tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakikat pernikahan.²⁴ Dengan demikian rukun nikah itu wajib terpenuhi ketika diadakan akad pernikahan, sebab tidak sah akadnya jika tidak terpenuhi rukunnya.²⁵

Jadi syarat-syarat nikah masuk pada setiap rukun nikah dan setiap rukun nikah mempunyai syarat masing-masing yang harus ada pada tujuan tersebut. Sehingga antara syarat dan rukun itu menjadi satu rangkaian artinya saling terkait dan melengkapi. Sementara itu sahnya perkawinan sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila

²⁴ Abd. al-Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*, Surabaya: BulanTerang, 1993, cet. I, h. 33.

²⁵ Moh. Anwar, *Fiqh Islam Muamalah, Munakahat, Faraid, dan Jinayah (Hukum Perdata dan Pidana Islam) Beserta Kaidah-kaidah Hukumnya*, Bandung : al-Ma'arif, 1971, h. 25.

dilakukan menurut agamanya dan kepercayaannya itu.²⁶ Maka bagi umat Islam ketentuan mengenai terlaksananya akad nikah dengan baik tetap mempunyai kedudukan yang sangat menentukan untuk sah atau tidaknya sebuah perkawinan adalah:

1. Adanya calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita

Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi adalah sebagai berikut :

a. Calon mempelai pria

- 1) Beragama Islam
- 2) Laki-laki
- 3) Jelas orangnya
- 4) Dapat memberikan persetujuan
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan

b. Calon mempelai wanita

- 1) Beragama Islam
- 2) Perempuan
- 3) Jelas orangnya

²⁶ Departemen Agama RI, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*

4) Dapat dimintai persetujuannya

5) Tidak terdapat halangan perkawinan

Antara keduanya harus ada persetujuan bebas, yaitu persetujuan yang dilahirkan dalam keadaan pikiran yang sehat dan bukan karena paksaan. Disyaratkan persetujuan bebas adalah pertimbangan yang logis karena dengan tidak adanya persetujuan bebas ini berarti suatu indikasi bahwa salah satu pihak atau keduanya tidak memiliki hasrat untuk membentuk kehidupan keluarga sebagai salah satu yang menjadi tujuan perkawinan.²⁷

2. Kewajiban membayar mahar atau mas kawin.

Mahar atau mas kawin dalam syari'at Islam merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar oleh seorang mempelai laki-laki kepada mempelai wanita. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat an-Nisaa' ayat 4 :

²⁷ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta : UU Press, 1974, h. 66

وَعَاثُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هِيَ مَرَّةٌ

[النساء: ٤]^{٢٨}

Artinya:

“Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (Q.S. an-Nisaa’: 4)

3. Harus dengan hadirnya wali dari calon mempelai perempuan.

Adanya wali bagi seorang wanita di dalam pelaksanaan akad nikahnya merupakan rukun daripada akad nikah tersebut. Ada beberapa syarat untuk laki-laki menjadi wali dalam nikah, yaitu muslim, akil dan baligh.²⁹

Berbicara tentang keberadaan wali dalam nikah ada dua kategori yang membedakan kedudukan serta kewenangan sebagai wali, yakni:

a. Wali Nasab

²⁸ Departemen Agama RI, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, h. 61

²⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995, h. 71.

Wali nasab adalah wali yang mempunyai hubungan darah dengan calon pengantin wanita baik vertikal maupun horizontal.

b. Wali Hakim

Wali hakim adalah penguasa atau wali penguasa yang berwenang dalam bidang perwalian, biasanya penghulu atau petugas lain dari Kantor Urusan Agama.³⁰

4. Harus disaksikan oleh dua orang saksi

Dalam al-Qur'an tidak diatur secara tegas mengenai saksi nikah itu, tetapi didalam talak dan rujuk disebutkan mengenai saksi, maka dapat disimpulkan bahwa untuk membuktikan telah diadakan perkawinan antaraseorang laki-laki dan seorang perempuan, disamping adanya wali harus pula saksi. Hal ini adalah sangat penting untuk kemashlahatan kedua belah pihak, dan kepastian hukum bagi masyarakat, demikian juga baik suami maupun isteri tidak begitu saja mudah dapat mengingkari ikatan perjanjian perkawinan tersebut.³¹

Selain disaksikan oleh dua orang saksi, perkawinan harus dicatatkan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Tahun

³⁰ R. Abdul Jumali, *Hukum Islam*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1999, h. 88

³¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*

1974 pasal 2 ayat (2) : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”³² Dan pencatatan adalah salah satu bukti otentik dalam berinteraksi.

5. Harus ada pengucapan ijab dan qabul

Yang dimaksud dengan ijab dan qabul adalah pengukuhan janji perkawinan sebagai suatu ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan secara sah yang diucapkan dengan jelas, meyakinkan dan tidak meragukan. Ijab qabul ini juga disebut dengan akad nikah. Akad nikah itu dilaksanakan dalam suasana hening dengan pihak wali menyatakan (ijab) dan dijawab oleh calon suami secara tegas dan jelas dengan menerima (qabul). Ijab qabul itu sifatnya langsung (tidak ditunda-tunda) dan tidak meragukan para saksi.³³

C. PENCATATAN PERKAWINAN

Allah SWT melukiskan dengan firman-Nya pada surat an-Nisa ayat 21 bahwa tali perkawinan itu merupakan suatu ikatan yang kuat *mitsaqon gholidhon* antara suami isteri.

³² M. Idris Ramulyo, h. 52.

³³ R. Abdul Djumali, h. 92-93.

Kemudian bagaimana mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga terwujud *mitsaqon gholidhon* tersebut menjadi tugas para mujtahid di sepanjang zaman. Pada mulanya syariat Islam baik dalam al-Qur'an atau al-Sunnah tidak mengatur secara kongkrit tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini berbeda dengan ayat muamalah (*mudayanah*) yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya.³⁴ Seperti halnya firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ [البقرة : ٢٨٢]

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (Q.S al-Baqarah: 282)

Dalam suatu negara yang teratur segala hal yang bersangkutan paut dengan penduduk harus dicatat, seperti kelahiran, kematian, pernikahan dan sebagainya. Lagi pula perkawinan berkaitan erat dengan waris mewarisi sehingga perkawinan perlu dicatat untuk menjaga jangan sampai ada kekacauan.

³⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, h. 107.

Beberapa peristiwa menunjukkan bahwasanya akad nikah sebagai ikatan kekeluargaan yang fundamental perlu dijaga dan diselamatkan. Sebab, terkadang terjadi dua orang pria dan perempuan mengaku sebagai suami isteri tanpa surat kawin kemudian salah satu pihak merasa telah lepas dari ikatan perkawinan sedang pihak lainnya membantah pula di depan pengadilan. Adapula sementara orang yang mengakui telah kawin dengan seorang perempuan dengan berdusta dan maksudnya untuk popularitas, atau untuk tujuan tertentu dengan cara gampang, karena fiqh memang dapat membenarkan dengan kesaksian umum atau saksi Samai dalam perkawinan. Karena itu, orang memerlukan surat kawin untuk menghormati akad ini dan untuk menjaga kemungkinan adanya pelanggaran-pelanggaran atau sangkalan dan juga untuk menghindari kerusakan-kerusakan yang mungkin timbul.³⁵

Atas dasar pemikiran ini maka dapat diketahui betapa urgensinya pencatatan perkawinan itu. Pencatatan perkawinan bertujuan agar terwujud adanya kepastian hukum. Keterlibatan hukum dan perlindungan hukum atas perkawinan itu sendiri. Dengan demikian maka pencatatan

³⁵ H.S.A al-Hamdani, *Risalah Nikah, Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002, h. 80.

perkawinan merupakan persyaratan formil sahnya perkawinan.

Persyaratan formil ini bersifat prosedural dan administratif.

Dengan demikian maka suatu perkawinan yang sah tidak akan sempurna jika tidak pada pegawai pencatat nikah yang berwenang. Dalam hal ini kiranya dapat dipetik dari kaidah fiqh yang berbunyi:

ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

Artinya:

“Sesuatu kewajiban yang tidak akan sempurna jika tidak disertai tindakan yang lain, maka tindakan itu menjadi wajib pula.”

Menyempurnakan akad nikah adalah wajib, tetapi ia tidak sempurna tanpa adanya pencatatan. Oleh sebab itu mencatatkan perkawinanpun hukumnya wajib.³⁶ Dengan adanya pencatatan perkawinan maka eksistensi perkawinan secara yuridis formal diakui. Dengan demikian maka suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi dua syarat, yaitu :

1. Ketentuan hukum materil, yaitu telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam.

³⁶ A. MuktiArto, “Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan”, dalam *Mimbar Hukum*, Jakarta: Inter masa, 1993, h. 47.

2. Ketentuan hukum formil, yaitu telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.

Perkawinan yang hanya memenuhi ketentuan hukum materiil tetapi tidak memenuhi ketentuan hukum formil dianggap tidak pernah ada perkawinan atau *wujuduhu ka'adamihi*, sedang perkawinan yang telah memenuhi ketentuan hukum formil tetapi ternyata tidak memenuhi ketentuan hukum materiil dapat dibatalkan.

Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah. Pegawai pencatat nikah wajib memberikan kutipan akta nikah tersebut kepada masing-masing suami isteri, sebagai alat bukti resmi. Pegawai pencatat nikah yang tidak mau memberikan kutipan akta nikah dapat dikenakan sanksi pelanggaran. Menurut hukum perkawinan di Indonesia, akta nikah ini mempunyai dua fungsi, yaitu formil dan materiil. Fungsi formil (*formalitas causa*), artinya untuk lengkapnya atau sempurnanya (dan bukan untuk sahnya) suatu perkawinan, haruslah dibuat akta otentik, yakni akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah (pasal 7 ayat (1) KHI). Disini Akta Nikah merupakan syarat formil untuk adanya perkawinan yang sah. Fungsi materiil (*probationis causa*), artinya Akta

Nikah mempunyai fungsi sebagai alat bukti karena memang sejak semula akta nikah dibuat sebagai alat bukti. Demikian pula halnya dengan akta cerai dan akta rujuk.³⁷

Pencatatan perkawinan dalam pelaksanaannya diatur dengan PP No. 9 tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 dan 4 tahun 1975 bab II pasal 2 ayat (1), PP Nomor 9 tahun 1975. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 32 tahun 1954, tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami isteri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekocokan diantara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan

³⁷ H.S.A Al Hamdani, h. 82.

upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak-hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami isteri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.³⁸

Tentang pencatatan perkawinan ini Kompilasi Hukum Islam menjelaskannya dalam pasal 5 :

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jo Undang-undang nomor 32 tahun 1954.

Teknis pelaksanaannya, dijelaskan dalam pasal yang menyebutkan:

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan pencatat nikah.
2. Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak mempunyai kekuatan hukum.³⁹

³⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998, h. 107

³⁹ Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, h. 116.

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pencatatan perkawinan, dapat dipahami bahwa pencatatan tersebut adalah syarat administratif. Artinya perkawinan tetap sah, karena standar sah dan tidaknya perkawinan ditentukan oleh norma-norma agama dari pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan. Pencatatan perkawinan diatur karena tanpa pencatatan suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibat yang timbul adalah apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan otentik dari perkawinan yang dilangsungkan. Tentu saja, keadaan demikian bertentangan dengan misi dan tujuan perkawinan itu sendiri.⁴⁰

Seperti diketahui pelaksanaan perkawinan itu didahului kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh calon mempelai atau orang tuanya atau wakilnya diberitahukan kehendak melangsungkan perkawinan kepada PPN (pasal 3 dan 4 PP). Selanjutnya PPN meneliti apakah tidak terdapat halangan menurut Undang-Undang dan meneliti surat-surat yang diperlukan (pasal 5 dan 6 PP) ini. Apabila ternyata dari hasil penelitian ini

⁴⁰ Ahmad Rofiq, h. 112.

terdapat halangan perkawinan atau belum dipenuhi syarat-syarat yang diperlukan maka keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya (pasal 7 ayat (2) PP). Bila pemberitahuan itu telah dipandang cukup dan memenuhi syarat-syarat yang diperlukan serta tidak terdapat halangan untuk kawin, maka pegawai pencatat membuat pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, menurut formulir yang telah ditetapkan dan menempelnya di KUA yang mudah dibaca oleh umum. Pengumuman serupa itu juga dilakukan di KUA yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman masing-masing calon mempelai (pasal 8 dan penjelasan pasal 9 PP).⁴¹

Adapun pelaksanaan perkawinannya baru dapat dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman tersebut (pasal 10 PP). Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada pihak ketiga guna mengajukan keberatan dan memohon pencegahan perkawinan itu apabila ia berpendapat bahwa perkawinan tersebut tidak dapat dilangsungkan karena terdapat halangan atau bahwa salah satu

⁴¹ M. Idris Ramulyo, h. 180.

pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan (pasal 13, 14, 15 dan 16 Undang-undang). Dan pencegahan itu sendiri harus diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan itu akan dilangsungkan dengan memberitahukan hal itu kepada Pegawai Pencatat yang pada gilirannya memberitahukan hal itu kepada para calon mempelai (pasal 17 Undang-undang, huruf 12). Dengan memperhatikan tata cara dan ketentuan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat perkawinan, kemudian diikuti oleh kedua orang saksi, dan oleh wali nikah dalam hal perkawinan dilakukan menurut agama Islam. Penandatanganan tersebut juga dilakukan oleh PPN yang bersangkutan. Dengan selesainya penandatanganan tersebut, maka perkawinan telah tercatat secara resmi (pasal 11 PP).

Secara lebih rinci, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Bab II pasal (2) menjelaskan tentang pencatatan perkawinan:

1. Pencatat perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai

pencatat, sebagaimana dimaksudkan dalam UU no 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.

2. Pencatat perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaanya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
3. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam pasal 9 PP ini.

Lembaga pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif, selain substansinya bertujuan untuk mewujudkan ketertiban hukum, ia mempunyai cakupan manfaat yang sangat besar bagi kepentingan dan kelangsungan suatu perkawinan. Terdapat dua manfaat pencatatan perkawinan, yakni manfaat preventif dan manfaat represif.

Sementara itu, dengan mengutip pendapat Ahmad Rofiq, Yayan Sopyan⁴² menyatakan bahwa pencatatan perkawinan memiliki dua manfaat preventif dan represif. Manfaat preventif diantaranya untuk menganggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat perkawinan, baik menurut hukum dan kepercayaannya itu, maupun menurut Undang-Undang. Dalam tataran praktis, penyimpangan itu dapat dideteksi melalui prosedur yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.⁴³

⁴² Yayan Sopyan, *ISLAM NEGARA Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional* (Jakarta: RM Books 2012), 134-135.

⁴³ Pasal 3 Peraturan Pemerintah, ayat (1) menyatakan, setiap orang yang melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan itu dilangsungkan, ayat (2) menyatakan, pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan, ayat (3) menyatakan, pengecualian terhadap waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting diberikan oleh camat atas nama bupati kepala daerah.

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA LIANG ASONA

A. LETAK GEOGRAFIS DAN KOMPOSISI PENDUDUK DESA LIANG ASONA

Desa Liang Asona adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara dengan luas mencapai 16,37 km². Ruang terbuka hijau di Desa Liang Asona cukup banyak. Hal tersebut dapat dilihat pada penggunaan lahan di Desa Liang Asona sebagian besar didominasi oleh sawah, yaitu sawah tadah. Selain itu juga terdapat hutan, dan perkebunan yang turut menyumbang jumlah ruang terbuka hijau di Desa Liang Asona. Jenis penggunaan lahan lain di luar ruang terbuka hijau adalah berupa kawasan pemukiman.

Batas daerah atau wilayah Desa Liang Asona adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara Desa Pahulu Batang Pane
- Sebelah timur Desa Nabonggal
- Sebelah selatan Desa Huta Baru
- Sebelah barat Desa Simandiingin Dolok

Kondisi morfologi di desa ini sebagian besar merupakan daerah yang cukup miring (pegunungan), dengan ketinggian kurang lebih 200 mdpl. Kondisi datar seperti ini lebih dijadikan sebagai pemukiman maupun lahan pertanian dan perhutanan. Sebagian besar kondisi topografi di Desa Liang Asona berada pada daerah yang cukup miring.

Jenis tanah yang lain adalah tanah hitam yang terdapat di sepanjang aliran sungai. Desa Liang Asona merupakan salah satu desa di Kecamatan Padang Bolak yang dialiri oleh dua aliran sungai. Salah satu sungai yang mengalir di Desa Liang Asona adalah sungai Liang Asona. Sungai tersebut juga mengalir beberapa daerah, seperti di Desa Pahulu Batang Pane, hingga mengalir Kota Padang Bolak yaitu Kota Kabupaten Padang Lawas Utara. Sungai tersebut memiliki debit air relatif besar, karena seringkali mengalami banjir jika di musim hujan. Jumlah penduduk di Desa Liang Asona selalu mengalami pertumbuhan pada tiap tahunnya. Berdasarkan data BPS Kabupaten Padang Lawas Utara sampai akhir Agustus 2018, laju pertumbuhan penduduknya sebesar 2,26%. Laju pertumbuhan tersebut relatif lebih kecil bila dibandingkan dengan desa lainnya di Kecamatan Padang Bolak, seperti Desa Siombob yang hanya mencapai laju

pertumbuhan 2,42%. Komposisi perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Desa Liang Asona bisa dikatakan relatif seimbang. Misalnya saja pada tahun 2010-2018, jumlah penduduk di Desa Liang Asona berkisar 385 jiwa, yang terdiri dari 191 pria dan 194 wanita. Artinya, dari perbandingan tersebut bisa dilihat untuk jumlah antara penduduk laki-laki dan perempuan di Desa Liang Asona masih relatif seimbang, yakni mencapai nilai 91,40%.

Tabel I. Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis

Kelamin.⁴⁴

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki- laki	191
Perempuan	194
Total	385

Sumber: BPS Kab. Padang Lawas Utara Tahun 2010-2018

⁴⁴ Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2010-2018

B. KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DESA LIANG ASONA

Berdasarkan data PDRB Kabupaten Padang Lawas Utara, sektor pertanian merupakan sektor utama penyumbang pendapatan terbesar di Desa Liang Asona. Berikut ini adalah beberapa kegiatan ekonomi yang berlangsung di Desa Liang Asona:

1. Pertanian

Desa Liang Asona memiliki jumlah sawah yang cukup besar. Sawah pada Desa Liang Asona termasuk dalam kategori sawah tadah hujan, sehingga tanaman pertanian seperti padi hanya dapat dipanen oleh petani 1 kali dalam setahun (karena hanya mengandalkan air hujan sebagai irigasinya). Tidak hanya sebagai petani sawah mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Liang Asona juga sebagai petani karet. Karena letak geografis dan fostur tanah yang cocok dengan karet.

2. Perkebunan

Desa Liang Asona terdapat pada lereng gunung. Adapun jenis tanaman tersebut adalah seperti tanaman palawija sayur-sayuran seperti: singkong, kacang panjang, meranti, dan jenis sayur lainnya. Dan jenis perkebunan lainnya adalah seperti: pinang, kopi, kemiri, nilam, dan lain-lain.

Sementara itu, ada juga sebagian masyarakat Desa Liang Asona yang merantau ke luar daerah dengan tempat tinggal tidak menetap yaitu sebagai, buruh pabrik, dan PNS. Selain mata pencaharian tersebut, masyarakat Desa Liang Asona juga ada yang berprofesi sebagai pedagang, karena di beberapa desa terdapat pasar, seperti pasar Simandiangan Dolok yang terdapat di Desa Simandiangan Dolok, pasar Padang Bolak yang terdapat di Kota Padang Bolak, dan di beberapa tempat lainnya. Serta sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Tabel II. Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian.⁴⁵

Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
Petani	368 Orang
Pedagang	5 Orang
Wiraswasta	4 Orang
Pegawai Honorer	6 Orang
PNS	2 Orang
Dan Lain- lain	-
Total	385

Sumber: BPS Kab. Padang Lawas Utara Tahun 2010-2018

⁴⁵ *Ibid.*

Dalam kehidupan masyarakat Desa Liang Asona, kehidupan keagamaan yang kuat mendominasi perilaku sosial budaya. Terbukti dengan sifat dan karakteristik yang telah mengakar, yaitu gotong royong dan kekeluargaan, solidaritas yang tinggi dan toleransi, kepercayaan yang kuat dan patuh terhadap Islam sebagai ciri masyarakat agamis, patuh terhadap ulama dan orang yang dituakan, serta lebih mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat.

C. PENDIDIKAN DAN KEAGAMAAN MASYARAKAT DESA LIANG ASONA

Dari segi pendidikan, masyarakat Desa Liang Asona termasuk memiliki tingkat pendidikan yang rendah, karena penduduk yang lulus Sekolah Dasar (SD) menduduki jumlah terbesar. Namun demikian, ada juga telah menyelesaikan SMP/SMA melalui Paket B, bahkan sampai ke jenjang perguruan tinggi.

Tabel III. Komposisi Penduduk Menurut

Pendidikan.⁴⁶

Jenis Tamatan	Jumlah
Perguruan Tinggi	3 Orang
SMA (sederajat)	9 Orang
SMP (sederajat)	20 Orang
SD (sederajat)	40 Orang
Tidak Tamat SD	30 Orang
Tidak Bersekolah	283 Orang
Total	385 Orang

Sumber: BPS Kab. Padang Lawas Utara Tahun 2010-2018

Tabel IV. Sarana dan Prasarana Pendidikan.⁴⁷

Sekolah	Jumlah	Jumlah Guru	Jumlah Murid
SD (sederajat)	1	9	130
SMP (sederajat)	1	8	115

Sumber: BPS Kab. Padang Lawas Utara Tahun 2010-2018

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

Di Desa Liang Asona untuk kesadaran orang tua menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang pendidikan formal dikatakan rendah, sedangkan dalam tingkat pendidikan informal juga amat miris hal ini dapat dilihat dari ketiadaannya kegiatan-kegiatan keagamaan seperti ketiadaannya Taman Pendidikan al-Qu'an (TPQ) dan juga ketiadaannya Madrasah Diniyah (sekolah keagamaan pada sore hari).

Kehidupan keagamaan masyarakat Desa Liang Asona dapat dikatakan sangat kuat. Hal ini disebabkan 100% agama masyarakat Desa Liang Asona merupakan beragama Islam (muslim).

Tabel VI. Sarana dan Prasarana Peribadatan.⁴⁸

No	Jumlah Sarana Peribadatan	Jumlah
1	Masjid	1
2	Mushalla (Surau)	2

Sumber: BPS Kab. Padang Lawas Utara Tahun 2010-2018

Dalam tingkat pemahaman, agama Islam merupakan agama yang dianut oleh masyarakat Desa Liang Asona. Banyak diantara mereka yang taat menjalankan ajaran agama seperti shalat, zakat, puasa dan ibadah-ibadah lain baik yang berhubungan langsung dengan Allah SWT maupun sesama

⁴⁸ *Ibid.*

manusia. Pengajian diselenggarakan di desa secara rutin dan tidak luput juga dalam memperingati hari besar agama Islam yang diselenggarakan oleh para ulama, para pendidik serta organisasi pemuda yang ada.

Adapun masyarakat di Desa Liang Asona dalam pemahaman terhadap ajaran agama Islam sebagian besar masih kurang, kebanyakan mengikuti apa yang dikerjakan oleh mereka yang dianggap malim kampung atau hatobangon⁴⁹ sebagai suri tauladan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu menurut masyarakat setempat bahwa segala peribadatan dianggap baik tanpa mengetahui sumber dan dasar hukum yang sebenarnya. Misalnya tentang hukum nikah, kebanyakan masyarakat menganggap bahwa nikah itu cukup dilaksanakan dihadapan ulama (hatobangon) yang disaksikan oleh sebagian anggota masyarakat tanpa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka masyarakat Desa Liang Asona sekarang ini sangat perlu memperoleh penerangan dan bimbingan dari para ulama atau para da'i agar dapat menjalankan perintah Allah sesuai dengan al-Qur'an serta sunnah rasul dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁴⁹ Malim kampung (hatobangon) adalah merupakan seorang ulama atau orang yang dianggap sudah mapan dibidang agama (hukum Islam).

BAB IV

TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP

NIKAH YANG DILAKUKAN TANPA PENCATATAN DI KANTOR URUSAN

AGAMA (KUA) DI DESA LIANG ASONA

A. PROBLEMATIKA MASYARAKAT DESA LIANG ASONA TERHADAP

PERNIKAHAN YANG DILAKUKAN TANPA PENCATATAN KANTOR

URUSAN AGAMA (KUA)

Pasca penulis melakukan penelitian ini di Desa Liang Asona, pelaksanaan perkawinan yang tidak dicatatkan di PPN (KUA) masih marak terjadi. Namun untuk meringkas penelitian ini penulis hanya mengambil beberapa sample pelaksanaan pernikahan yang tidak dicatatkan di PPN (KUA) Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, yang berarti keseluruhan pasangan tersebut terdapat 95 pasangan atau berjumlah 190 orang. Namun disini penulis hanya menuliskan beberapa sample saja, adapun beberapa diantara pelaku pasangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Julfahri Siregar (36) dan Hannum (35)

Merupakan salah satu pasangan suami istri yang tidak memiliki buku nikah atau pernikahannya tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama

(KUA) Padang Bolak. Julfahri Siregar yang juga sekaligus berprofesi sebagai malim kampung membenarkan bahwa dirinya memang tidak memiliki buku nikah atau pernikahannya tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Alasan disaat ditanya kenapa pernikahannya tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) adalah karena letak Kantor Urusan Agama (KUA) setempat yang sangat jauh dari desa hingga menyebabkan sulit untuk mengurusnya.⁵⁰

2. Marabaik Pasaribu (27) dan Lela Sari Siregar (23)

Merupakan salah satu pasangan suami istri yang tidak memiliki buku nikah atau pernikahannya tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Padang Bolaki. Alasan pasangan suami istri ini tidak memiliki buku nikah adalah karena sulit proses pengurusannya. Kesulitan itu berupa jarak antar desa ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat yang sangat jauh.⁵¹

3. Dani (31) dan Ati Hasibuan (23)

Merupakan salah satu pasangan suami istri yang tidak memiliki buku nikah atau pernikahannya tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Adapun alasan pasangan ini tidak memiliki buku

⁵⁰ Hasil wawancara dengan salah satu pasangan yang pernikahannya tidak dicatatkan di KUA pada 25 Mei 2019 Jam 17.30 WIB

⁵¹ Hasil wawancara dengan salah satu pasangan yang pernikahannya tidak dicatatkan di KUA pada 8 Juni 2019 jam 10.00 WIB

nikah adalah karena ketiadaan sarana untuk proses pengurusannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.⁵²

4. Dani (31) Sari Ati Hasibuan (23)

Merupakan salah satu pasangan suami istri yang tidak memiliki buku nikah atau pernikahannya tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Adapun alasan pasangan ini tidak memiliki buku nikah adalah karena ketiadaan sarana untuk proses pengurusannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.⁵³

5. Reski Hamonangan Siregar (23) dan Tilom Ria Rambe (19)

Merupakan salah satu pasangan suami istri yang tidak memiliki buku nikah atau pernikahannya tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Tilom Ria Rambe yang berstatus istri saat diwawancarai di kediamannya membenarkan bahwa pasangannya tidak memiliki buku nikah atau pernikahannya tidak dicatatkan di KUA, beliau membeberkan alasannya karena akses jalan yang tidak mendukung dan alat transportasi umum yang tidak melewati kampung mereka.⁵⁴

⁵² Hasil wawancara dengan salah satu pasangan yang pernikahannya tidak dicatatkan di KUA pada 8 Juni 2019 jam 11.00 WIB

⁵³ Hasil wawancara dengan salah satu pasangan yang pernikahannya tidak dicatatkan di KUA pada 8 Juni 2019 jam 14.00 WIB

⁵⁴ Hasil wawancara dengan salah satu pasangan yang pernikahannya tidak dicatatkan di KUA pada 8 Juni 2019 jam 15.40 WIB

6. Ahlan Harahap (34) dan Masbulan Siregar (30)

Merupakan salah satu pasangan suami istri yang tidak memiliki buku nikah atau pernikahannya tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Adapun alasan dari pasangan ini ketika diwawancarai di kediaman adalah karena kurang tau nya terhadap fungsi atau manfaat buku nikah terhadap pernikahan.⁵⁵

Setelah penulis terjun lapangan dan dari setiap keterangan pasangan pelaku nikah, penulis memberikan kesimpulan beberapa problematika yang dihadapi masyarakat terhadap pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan di KUA, adapun problematika tersebut adalah sebagai berikut:

1. Keadaan ekonomi masyarakat

Mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Liang Asona yaitu karet. Maka tidak heran kehidupan masyarakat berada di garis kemiskinan apalagi situasi kondisi belakangan ini harga karet yang anjlok dan keberadaan desa di pegunungan membuat lebih banyak musim hujan dari pada musim kemarau. Maka akibat dari keberadaan

⁵⁵ Hasil wawancara dengan salah satu pasangan yang pernikahannya tidak dicatatkan di KUA pada 9 Juni 2019 jam 09.00 WIB

ekonomi inilah masyarakat tidak bisa berpikir lebih luas apalagi tentang pencatatan pernikahan di PPN (KUA).

2. Kurangnya pendidikan (pemahaman) tentang pencatatan pernikahan.

Hal ini dapat dilihat dari rata-rata pelaku nikah yakni berpendidikan SD dan tidak tamat SD, sehingga pemahaman dan pengetahuan tentang nikah (pencatatan nikah) kurang, dan hanya sebatas pada apa yang diberikan oleh malim kampung atau hatobangon yang ada di desanya. Pembahasan ini akan dibahas di sub bab selanjutnya.

3. Jarak Desa ke Kantor Urusan Agama (KUA) yang cukup jauh.

Di bab sebelumnya sudah dijelaskan tentang Desa Liang Asona yang keberadaanya di daerah pegunungan. Dengan hal ini membuat masyarakat malas bergerak untuk melakukan pengadministrasian (melaporkannya) ke KUA. Letak Desa Liang Asona ke Kantor Urusan Agama (KUA) berkisar lebih kurang 80 km.

4. Infrastruktur jalan dari desa (sebaliknya) ke Kantor Urusan Agama (KUA) yang tidak mendukung.

Jenis jalan yang melintas dari desa ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat adalah jalan tanah (sama sekali belum terciptasi oleh aspal). Ditambah lagi yang keberadaan desa ini di daerah pegunungan hingga jalan yang mesti dilalui pun mengerikan.

5. Keberadaan alat transportasi (angkutan umum/angkutan pribadi) yang tidak mendukung.

Hal ini disebabkan karena status jalan yang melewati desa tersebut bukan merupakan jalan nasional atau jalan provinsi sehingga perhatian pemerintah setempat atau pemerintah pusat berkurang. Tidak ada angkutan umum yang lewat dan hanya beberapa orang yang memiliki kendaraan pribadi di desa tersebut.

6. Beberapa diantara pelaku nikah tersebut belum cukup umur untuk menikah sesuai ketentuan undang-undang.

Rata-rata pelaku nikah yang dilakukan tanpa pencatatan tersebut berusia berkisar 15-19 tahun (pada saat menikah). Padahal dalam undang-undang mesti minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

Selain wawancara dengan para pelaku nikah tersebut, untuk menambah ke akuratan data penulis juga mewawancarai pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai berikut:

1. H. Parundingan Hasibuan S.Ag

Merupakan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Bolak, saat diwawancarai di Kantor KUA Padang Bolak bapak kepala KUA tersebut membenarkan bahwa hampir seluruh pasangan suami istri di desa Liang Asona tidak memiliki buku nikah atau pernikahannya tidak dicatatkan di KUA Padang Bolak.⁵⁶

2. Samarudin Siregar S.Ag

Merupakan salah satu pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Bolak. Diwawancarai di kantornya, membenarkan bahwa hampir seluruh pasangan suami istri di desa Liang Asona tidak memiliki buku nikah atau pernikahannya tidak dicatatkan di KUA Padang Bolak.⁵⁷

3. Partomuan Batubaru

⁵⁶ Hasil wawancara dengan salah satu pasangan yang pernikahannya tidak dicatatkan di KUA pada 10 Juni 2019 jam 09.00 WIB

⁵⁷ Hasil wawancara dengan salah satu pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Bolak pada 10 Juni 2019 10.40 WIB

Merupakan staf di kantor KUA Padang Bolak, diwawancarai di kantornya, membenarkan bahwa hampir seluruh pasangan suami istri di desa Liang Asona tidak memiliki buku nikah atau pernikahannya tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Padang Bolak.⁵⁸

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa alasan utama masyarakat melakukan nikah tanpa pencatatan di PPN/Kantor Urusan Agama (KUA) yakni karena letak desa dari Kantor Urusan Agama yang amat jauh, infrastruktur dan alat transportasi yang tidak mendukung, dan juga kurangnya pemahaman tentang pentingnya pencatatan pernikahan di KUA.

B. PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA LIANG ASONA TERHADAP PENCATATAN PERNIKAHAN DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)

Pemahaman (pengetahuan) masyarakat Desa Liang Asona terhadap pencatatan pernikahan di PPN (KUA) kurang (bahkan sebagian sama sekali tidak mengetahui) karena masyarakat pelaku nikah tersebut mayoritas berlatar belakang tamat SD dan tidak tamat SD sehingga masalah hukum Islam pun (khususnya masalah pernikahan) diserahkan kepada yang lebih paham di dalamnya yaitu hatobangon atau malim kampung. Hatobangon

⁵⁸ Hasil wawancara dengan salah satu pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Bolak pada 10 Juni 2019 14.30 WIB

atau malim kampung yang mengesahkan nikah tanpa pencatatan ini didasarkan pada aspek kemaslahatan dari latar belakang pelaku nikah. Alasan ini mereka kemukakan setiap kali akan menikahkan. Hatobangon atau malim kampung berpandangan bahwa nikah tanpa pencatatan ini sudah merupakan pernikahan yang sah karena pada saat prosesi pernikahan sudah memenuhi syarat dan rukun nikah.

Adapun pelaksanaan prosesi pernikahan tanpa pencatatan di Desa Liang Asona ini dihadiri oleh:

- Kedua calon mempelai
- Dua orang saksi
- Wali dan keluarga kedua belah pihak
- Disertai hatobangon (malim kampung) setempat yang memimpin prosesi akad nikah.

Menurut Bapak Julpahri Siregar yang sering menikahkan pasangan sebagai suami istri di Desa Liang Asona secara “tanpa pencatatan”, baik sanak famili maupun tetangga sendiri, yakni sebagai berikut:

1. Mencegah terjadinya kumpul kebo (zina), sesuai dengan firman Allah

SWT:

ولا تقر بوا الزنا انه كان فاحشة و ساء سبيل

2. Demi kemaslahatan umat.

Karena syarat dan rukun secara fikih telah terpenuhi untuk menikah.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai oleh para pelaku nikah tanpa pencatatan itu adalah sebagai berikut:

a. Tujuan yang bersifat normatif

Yang termasuk dalam kategori ini adalah keinginan untuk melegalkan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan karena belum menikah. Di dalamnya tersirat pengertian bahwa dengan menikah secara tanpa pencatatan berarti perbuatan yang semula dianggap maksiat, dosa, dan mengakibatkan perasaan bersalah itu berubah statusnya menjadi tindakan atau perbuatan yang sah, halal bahkan berpahala. Dalam konteks ini, banyak sekali perbuatan yang menurut norma agama dilarang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan karena belum menikah, seperti bersama-sama di tempat yang sepi tanpa mahram, bernesraan, berciuman, dan bersetubuh. Perbuatan-perbuatan tersebut akan berubah statusnya menjadi sah, halal bahkan berpahala melakukannya setelah yang bersangkutan

menikah. Jadi, dalam konteks ini nikah tanpa pencatatan seperti ini berfungsi sebagai lembaga sekaligus alat untuk melegalisasi perbuatan-perbuatan tertentu bagi para pelakunya.

b. Tujuan yang bersifat psikologis

Dalam kategori ini, nikah tanpa pencatatan pernikahan lebih untuk memperoleh ketenangan atau ketenteraman jiwa. Tujuan ini dapat dimengerti karena semua orang yang normal menghendaki agar jiwanya senantiasa tenang dan tentram. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa hampir semua pelaku nikah ini mengharapkan aspek ini, seperti untuk mengatasi perasaan gelisah, khawatir berbuat dosa, dan lain-lain yang mengindikasikan adanya tujuan ini.

b. Tujuan yang bersifat biologis

Yang tergolong dalam kategori ini adalah untuk memperoleh pengaturan dan kepuasan seksual. Memang, nikah bukanlah satu-satunya cara memenuhi kebutuhan vital ini. Akan tetapi dalam masyarakat yang taat pada ajaran agama dan adat yang tidak

membolehkan budaya seks bebas dan kumpul kebo, pernikahan ini merupakan alternatif untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

C. ANALISIS TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN YANG DILAKUKAN TANPA PENCATATAN DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)

Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa adalah tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada dalam pergaulan masyarakatnya. Perkawinan dipengaruhi pula oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan agama (keyakinan) yang dianut oleh masyarakat tersebut. Seperti halnya hukum perkawinan di Indonesia yang termuat dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 adalah dipengaruhi oleh adat dan budaya setempat yang berakibat lain masyarakat lain pula aturan perkawinannya. Maksud dari perkawinan yang sah disini adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam Indonesia, memenuhi

baik rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinan, seperti yang diatur dan ditentukan oleh UU No. 1 tahun 1974.⁵⁹

Berdasarkan uraian di atas timbul masalah apakah sah perkawinan yang dilakukan tanpa pencatatan. Bila terpaku pada pertanyaan ini saja dan memberikan jawabannya tentulah dengan mudah dijawab sah atau tidak sah. Tetapi andai kata ditelusuri ekstensifnya secara luas dan direnungkan dalam konteks kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, baik secara sosiologis, psikologis maupun yuridis dengan segala akibat hukum dan konsekuensinya, tentulah sangat luas obyek yang ditimbulkan sangat besar pengaruhnya dalam perkembangan peradaban manusia dengan teknologi dewasa ini, baik dalam hubungan individu maupun dalam kaitannya dengan hubungan sebagai anggota masyarakat, bahkan dapat memengaruhi bentuk masyarakat serta sistem hukum yang berlaku dalam suatu negara. Karena, dari seluruh sistem hukum, maka hukum perkawinanlah yang menentukan dan

⁵⁹ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam, Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlus Sunnah dan Negara-negara Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988, h. 109.

mencerminkan sistem kekeluargaan dan hukum yang berlaku dalam masyarakat itu.⁶⁰

Pertanyaan itu termasuk bidang hukum perkawinan, yaitu suatu bentuk perkawinan yang telah merupakan mode masa kini yang timbul dan berkembang diam-diam pada sebagian masyarakat Islam Indonesia. Mereka berusaha menghindari diri dari sistem dan cara pengaturan pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974, yang birokratis dan berbelit-belit serta lama pengurusannya. Untuk itu mereka menempuh cara sendiri yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam ilmu hukum cara seperti itu dikenal dengan istilah "penyelundupan hukum".⁶¹

Yang dipermasalahkan dalam kaitan dengan penelitian ini adalah tentang pendaftaran (pengadministrasian) nikah dalam rangkaian pertanyaan tentang sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan tanpa pencatatan. Bila ditafsirkan secara analogi atau qiyas dan dihubungkan

⁶⁰ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bina Aksara, 1996, h. 240.

⁶¹ Penyelundupan hukum yaitu suatu cara menghindari diri dari persyaratan hukum yang ditentukan oleh Undang-undang dan peraturan yang berlaku dengan tujuan perbuatan bersangkutan, dapat menghindarkan suatu akibat hukum yang tidak dikehendaki atau untuk mewujudkan suatu akibat hukum yang dikehendaki. (Lihat Moh. Idris Ramulyo, h. 240)

sistematis antara surat al-Baqarah ayat 282 dengan surat an-Nisaa' ayat 21 berkesimpulan bahwa perkawinan (nikah) menurut hukum Islam, disamping harus memenuhi rukun dan syarat-syarat materil, harus pula didaftarkan dengan *katibun bi adli* (penulis yang adil diantara kamu. Dalam hubungan ini petugas pendaftaran nikah, talak dan rujuk dalam Islam menurut UU No. 22 tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 tahun 1954 yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN), penghulu (*qadhi*)).

Walimah juga sangat penting dikerjakan demi menjaga kecurigaan atau sangkaan yang tidak baik dari anggota masyarakat sekitarnya tentang pergaulan antara seorang wanita dengan seorang pria yang bukan muhrim. Sehubungan dengan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana telah disebutkan di atas, hingga kini kalangan teoritis dan praktisi hukum masih bersilang pendapat tentang pengertian yuridis masalah ini. Pertama, bahwa sahnya suatu perkawinan semata-mata hanya harus memenuhi pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan tersebut di atas, yakni perkawinan telah dilaksanakan menurut ketentuan syari'at Islam secara sempurna (memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat nikah yang umumnya dianggap standar oleh dunia Islam). Mengenai pencatatan nikah oleh PPN, tidaklah

merupakan syarat sahnya nikah, tetapi hanya kewajiban administratif saja.

Kedua, bahwa sahnya suatu akad nikah harus memenuhi ketentuan UU perkawinan pasal 2 ayat (1) mengenai tata cara agama dan ayat (2) mengenai pencatatan nikah oleh PPN secara simultan.

Dengan demikian, ketentuan ayat (1) dan ayat (2) tersebut merupakan syarat kumulatif, bukan alternatif. Karena itu perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan syariat Islam tanpa pencatatan oleh PPN belumlah dianggap sebagai perkawinan yang sah.

Atas dasar pemikiran di atas kiranya dapat dikemukakan bahwa syarat-syarat perkawinan yang diatur oleh UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya PP No. 9 tahun 1975, Peraturan Menteri Agama nomor 3 tahun 1975 juga UU no 22 tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 tahun 1954, tidak bertentangan dengan hukum Islam, bilamana tidak boleh dikatakan telah membawa aspirasi hukum Islam secara konkret dan ketentuan hukum Islam bahkan telah dianggap merupakan ijtihad baru yang harus diijmali, sepanjang mengenai syarat-syarat sahnya nikah (perkawinan).

Menurut hemat penulis, bahwa nikah yang sah menurut hukum Islam dan hukum negara yaitu bahwa adanya suatu akad nikah itu apabila telah dilaksanakan menurut ketentuan syari'at Islam, dihadapan dan dicatatkan oleh Panitia Pencatatan Nikah (PPN).

Adapun alasan untuk memperkuat penulis mengenai hal di atas adalah:

1. Mentaati perintah agama dan mentaati perintah negara/pemerintah, adalah wajib sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisaa' ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا [النساء: ٩٥]

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S. an-Nisaa': 59)

2. Perintah al-Qur'an ini sangat positif, sebab mendidik manusia menciptakan masyarakat yang sadar dan taat hukum agama juga hukum negara, demi terwujudnya kesejahteraan dan kebahagiaan hidupnya di dunia dan akhirat. Akta nikah sebagai bukti otentik sahnyanya perkawinan seseorang adalah sangat bermanfaat dan maslahah bagi dirinya dan keluarganya (isteri dan anaknya) untuk menolak kemungkinan di kemudian hari adanya pengingkaran atas perkawinannya dan akibat hukum dari perkawinannya itu (harta bersama dalam perkawinan dan kewarisannya), serta juga untuk melindunginya dari fitnah dan tuduhan zina. Maka jelaslah pencatatan nikah untuk mendapatkan akta itu penting untuk kemaslahatan bersama.
3. *Qiyas aulawi* kepada isyarat untuk menuliskan transaksi muamalah sebagaimana disebutkan dalam al-Quran surat al Baqarah ayat 282. Apabila transaksi muamalah saja harus dicatat, maka pencatatan akad perkawinan sebagai sebuah ikatan yang kuat lagi suci (*mitsaqan ghal'zhan*) lebih utama dan lebih penting.

4. Berdasarkan *masalah mursalah*⁶², pencatatan perkawinan dengan bukti akta perkawinan, meskipun secara formal tidak ada ketentuan ayat atau sunnah yang memerintahkannya, akan tetapi kandungan maslahatnya besar sekali dan sejalan dengan ketentuan syara' yang ingin mewujudkan kemaslahatan dan mencegah segala kemudharatan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang pencatatan pernikahan diatur dalam pasal 5 dan pasal 6 KHI, adapun bunyi masing-masing pasal tersebut adalah:

Pasal 5 (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat

Islam setiap perkawinan harus dicatat.

(2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1),

dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah

sebagaimana yang diatur dalam Undangundang

No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32

Tahun 1954.

⁶² Teori ini dikembangkan oleh Imam Malik bin Anas (93-179 H) sebagaimana dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili yang mengadopsi pendapat al-Syathibi.

- Pasal 6 (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 KHI dapat diketahui bahwa pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam diatur sebagai berikut.⁶³

- a. Setiap perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Islam Indonesia harus dicatat agar terjamin ketertiban perkawinan;
- b. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam UU 22/1946;
- c. Perkawinan yang sah adalah perkawinan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN);

⁶³ Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 No. 03 September 2017, h. 263

- d. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan PPN merupakan perkawinan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum.

Terkait dengan bukti perkawinan harus dengan Akta Nikah yang dibuat oleh PPN, ketentuan dalam Pasal 7 KHI menyatakan sebagai berikut:⁶⁴

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. hilangnya Akta Nikah;
 - c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

⁶⁴ *Ibid.*

e. dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

(4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Maka jelas bahwa sesungguhnya pencatatan perkawinan bagi umat Islam merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan bagi yang melangsungkan perkawinan. Dengan tidak dilakukannya kewajiban pencatatan perkawinan, maka perkawinan yang telah dilaksanakan menurut tata cara hukum Islam tersebut menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak sah. Hal ini berhubung pengaturan pencatatan perkawinan berdasarkan KHI bersifat imperatif yang mewajibkan setiap perkawinan bagi masyarakat Islam untuk dicatat, yang pencatatannya dilakukan oleh PPN sebagaimana diatur dalam UU 22/1946.⁶⁵

⁶⁵ *Ibid.* 265

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan keterangan diatas analisis tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) di desa liang **asona**, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

7. Problematika masyarakat tidak mencatatkan nikahnya di Kantor Urusan Agama (KUA) adalah karena: (1) Keadaan ekonomi masyarakat. (2) Kurangnya pendidikan (pemahaman) tentang pencatatan pernikahan. (3) Jarak Desa ke Kantor Urusan Agama (KUA) yang cukup jauh. (4) Infrastruktur jalan dari desa (sebaliknya) ke Kantor Urusan Agama (KUA) yang tidak mendukung. (5) Keberadaan alat transportasi (angkutan umum/angkutan pribadi) yang tidak mendukung. (6) Beberapa diantara pelaku nikah tersebut belum cukup umur untuk menikah sesuai ketentuan undang-undang.
8. Pemahaman (pengetahuan) masyarakat Desa Liang Asona terhadap pencatatan pernikahan di PPN (KUA) kurang (bahkan sebagian sama

sekali tidak mengetahui) karena masyarakat pelaku nikah tersebut mayoritas berlatar belakang tamat SD dan tidak tamat SD sehingga masalah hukum Islam pun (khususnya masalah pernikahan) diserahkan kepada yang lebih paham di dalamnya yaitu hatobangon atau malim kampung.

9. Bahwa sesungguhnya pencatatan perkawinan bagi umat Islam merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan bagi yang melangsungkan perkawinan. Dengan tidak dilakukannya kewajiban pencatatan perkawinan, maka perkawinan yang telah dilaksanakan menurut tata cara hukum Islam tersebut menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak sah. Hal ini berhubungan pengaturan pencatatan perkawinan berdasarkan KHI bersifat imperatif yang mewajibkan setiap perkawinan bagi masyarakat Islam untuk dicatat, yang pencatatannya dilakukan oleh PPN sebagaimana diatur dalam UU 22/1946.

B. SARAN

Berdasarkan penjelasan dan kesimpulan tersebut, ada beberapa hal yang harus disarankan yakni:

1. Seharusnya problematika yang dihadapi masyarakat seperti yang dituliskan diatas dapat ditanggulangi PemDa setempat. Semisal keadaan ekonomi, PemDa seyogianya mampu menambahkan opsi lain selain dari bertani atau berkebun kepada masyarakat (menciptakan lapangan pekerjaan baru). Kurangnya pendidikan (pemahaman) masyarakat, PemDa mampu menanggulangnya semisal dengan cara sekolah paket b atau paket c atau dengan cara bekerja sama dengan sekolah-sekolah tinggi untuk melakukan penyuluhan. Dan problematika lainnya yang seharusnya semua itu bisa diatasi PemDa setempat.
2. Seharusnya instansi terkait seperti KUA setempat (kemenag) saling kerja sama untuk menanggulangi kebutaan masyarakatan Desa Liang Asona terhadap pencatatan pernikahan. Semisalnya saja KUA setempat mengadakan penyuluhan hukum.
3. Terus melihat KHI tentang pentingnya pencatatan perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

A. MuktiArto, "Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan",
dalam *Mimbar Hukum*, Jakarta: Inter masa, 1993

Abd Al-Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*, Surabaya:
BulanTerang, 1993

Abdurrahman Al-Jaz'ri, *Al-Fiqh „ala Madzâhib al-Arba 'ah*, Jus IV, Bairut :Dār
al-Kutub al-Ilmiyah, 1990

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada,
1995

Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika,
2013

Ali Ansori, *Al-Mizan al Kubra*, Juz II, Semarang :Toha Putra, t.th

Amiur Nuruddin dkk., *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana,
2004

Departemen Agama RI, *Al-Qur 'an al-Karim dan Terjemahnya*, Semarang
:CV. Toha Putra, 1996

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*

Departemen Agama RI, *Undang-undang No. 1 Tahun 1974*

Elvi Lusiana, *100+ Kesalahan dalam Pernikahan*, Jakarta: Redaksi Qultum Media

H.S.A Al Hamdani, *Risalah Nikah, Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002

Imam Taqiyudin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Hism ad-Damasyqiasy- Syafi'i, *Kifayatul Akhyar*, Juz 2, Semarang, Toha Putra
Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1999

Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta, 1974

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Moh. Anwar, *Fiqh Islam Muamalah, Munakahat, Faraid, dan Jinayah (Hukum Perdata dan Pidana Islam) Beserta Kaidah-kaidah Hukumnya*, Bandung : al-Ma'arif, 1971

Nasarudin Latif, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 2001, Cet.1

R. Abdul Jumali, *Hukum Islam*, Bandung : CV. Mandar Maju, 1999

Rachmadi Usman, *Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 14 No. 3

Saifuddin Afief, *Notaris Syariah dalam Praktik Jilid ke I Hukum Keluarga Islam*, Jakarta: Darunnajah Publishing, 2011

Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta : UU Press, 1974

Sayyid Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subu al-Salam*, Juz III, Bandung : Dahlan

Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta

Tinta Medina, *Pernikahan Syar'i: Menjaga Harga dan Martabat Manusia*, Solo: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan

Bukti Wawancara



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : BANGUN DASOPANG
2. Tmpat Tgl. Lahir : Desa Liang Asona 10 Januari 1993
3. jenis Kelamin : Laki – Laki
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Status : Belum Kawin
7. Alamat : Ds. Liang Asona Kec. Padang Bolak, PALUTA
8. Pekerjaan : Mahasiswa
9. Nama Orang Tua
 - a. Ayah
 1. Nama : Alm. Ahmad Toha Hasibuan
 2. Pekerjaan : Tani
 - b. Ibu
 1. Nama : Sahroeni Siregar
 2. Pekerjaan : Tani
10. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDN 101240 Liang Asona
 - b. SMP PAKET B : SMP PAKET B Liang Asona
 - c. MAS : MAS Nurul Iman Purba Bangun